



2022

**PERUBAHAN
RENCANA
KERJA**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MADIUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022** telah selesai disusun. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis DPMPTSP yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya pencapaian target yang telah ditentukan dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Madiun, 31 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	24
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ²⁷	
2.3.1 Pelayanan DPMPTSP.....	27
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPTSP	28
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	28
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	30
2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023.....	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	400
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	411
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	411
3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun.....	455
3.3 Program dan Kegiatan.....	455
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	533
BAB V PENUTUP.....	600

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan per tahun. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh DPMPTSP sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja yang berpedoman pada Renstra DPMPTSP, hasil evaluasi Renja DPMPTSP tahun lalu dan evaluasi hasil Renja DPMPTSP tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja DPMPTSP; pembahasan Rancangan Renja DPMPTSP; perumusan Rancangan Akhir Renja DPMPTSP dan Verifikasi Rancangan Akhir Renja DPMPTSP.

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja untuk tahun terakhir periode Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran DPMPTSP Tahun 2022 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja DPMPTSP mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2023, Renstra DPMPTSP, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan penanaman modal.

Di tahun 2021, terdapat perubahan pada dokumen RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan pada RPJMD Kabupaten Madiun. DPMPTSP Kabupaten Madiun menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan perubahan terhadap Renstra DPMPTSP agar selaras dengan perubahan RPJMD Kabupaten Madiun. Adanya perubahan Renstra tentu akan berdampak pada dokumen Renja. Untuk itu dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 telah menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

- Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

- Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
 30. Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun;
 31. Peraturan Bupati Madiun Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra DPMPTSP dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum di lingkup DPMPTSP dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun 2022 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja DPMPTSP adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh DPMPTSP.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis dan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2021 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 3.3 Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN MADIUN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun 2021. Evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2022.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Pada tahun 2021 terdapat 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 4 (empat) program fungsional urusan penanaman modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dari sejumlah program fungsional tersebut, terdapat dua program yang tidak memenuhi target kinerja dan 2 (dua) program lainnya telah memenuhi target kinerja. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

1) **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN**

MODAL, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	70%	56,08%	80,11%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	372.462.000	309.267.278	83,03%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	55.429.472	24.048.428	43,39%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	276.269.287	256.744.100	92,93%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	40.763.241	28.474.750	69,85%

Dengan demikian tingkat realisasi capaian pendanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mencapai 83,03%.

Indikator **Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan LKPM** belum dapat memenuhi target, dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan investor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan LKPM. Selain itu, kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Madiun juga masih lemah dikarenakan keterbatasan personil.

Namun, dengan adanya Online Single Submission versi terbaru, DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat menjangkau data pelaku usaha di Kabupaten Madiun sebagai pedoman untuk kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut. Ke depan, pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.

2) **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	8,56%	85,60%

Pada persentase capaian persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan sebesar 8.56% merupakan hasil pengolahan data yang bersumber data rekapitulasi kunjungan ke loket DPMPTSP Kab. Madiun dan loket pendukung Komtek serta data kunjungan ke website DPMPTSP Kab. Madiun selama kurun tahun 2020 dan 2021. Tercatat data kunjungan

masyarakat di tahun 2020 adalah 6.268 dan 6.805 di tahun 2021, sehingga peningkatannya hanya sebesar 8,56%. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan layanan perizinan utamanya tingkat kunjungan masyarakat ke loket DPMPTSP di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun. Selain itu ada beberapa kendala teknis lainnya :

- 1) Hasil data pada tahun 2020, untuk kategori data hasil kunjungan pemohon pada loket DPMPTSP Kab. Madiun baru tercatat dalam sistem database pada bulan November – Desember 2020;
- 2) Hasil data pada tahun 2020, untuk kategori data hasil kunjungan pemohon pada website DPMPTSP Kab. Madiun baru tercatat dalam sistem database terhitung triwulan II Tahun 2020;
- 3) Hasil data pada tahun 2021, untuk kategori data hasil kunjungan pemohon pada website DPMPTSP Kab. Madiun, pada bulan Januari 2021 belum tercatat pada sistem database sehingga terdapat data yang tidak terpenuhi.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

1) Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	14 hari kerja	14 hari kerja	100%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	215.393.035	213.429.400	99,09%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	49.851.230	49.695.400	99,69%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	165.541.805	163.734.000	98,91%

2) **Program Promosi Penanaman Modal**, dengan capaian indikator kinerja:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai minat investasi	1,4 T	1,987 T	141,93%

Program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	67.818.580	67.057.750	98,88%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	67.818.580	67.057.750	98,88%

Sepanjang tahun 2021 di masa pandemi Covid-19, DPMPTSP Kabupaten Madiun, terus melakukan upaya peningkatan pelayanan perizinan diantaranya:

a) Pelayanan Perizinan dan Pengaduan via aplikasi Whatsapp

Media sosial juga menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain website resmi, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga membuka pelayanan informasi perizinan dan non perizinan serta pengaduan melalui aplikasi Whatsapp. Fasilitas Whatsapp akan memberikan informasi tentang persyaratan perizinan maupun tracking dokumen izin secara manual dengan nomor layanan 081 335 600 429. Sedangkan pengaduan dapat disampaikan di nomor layanan 082 333 565 557.

b) Pembangunan Mal Pelayanan Publik

Untuk semakin mempermudah pelayanan, Pemerintah Kabupaten Madiun telah menyediakan Mal Pelayanan Publik sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Ruang lingkup pelayanan pada MPP adalah seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta. Di dalam MPP telah bergabung seluruh OPD teknis penyedia layanan perizinan/non perizinan, BUMN/BUMD, lembaga perbankan dan juga Kementerian.

c) Pelayanan PERIUK

Merupakan inovasi pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha berupa pendampingan saat mengurus izin usaha melalui OSS maupun saat pelaku usaha akan melakukan pelaporan yang memang wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha secara berkala (Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM), yang dilakukan secara Online/Zoom setiap hari pada jam kerja. Kegiatan ini bermula saat terjadi pandemi COVID 19, dimana

kegiatan tatap muka sangat dibatasi, padahal kebutuhan pelaku usaha untuk mendapatkan pendampingan sangat tinggi.

Permasalahan

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

a. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain OSS RBA, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) juga berhenti untuk diimplementasikan karena terkendala Perda perubahan yang mengatur tentang bangunan dan retribusi belum selesai disusun. DPMPTSP juga sering mengalami kendala dalam mengakses kedua aplikasi pusat tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, *web traffic* maupun seringnya *maintenance* pada aplikasi tersebut.

b. Permasalahan Regulasi atau kebijakan

Pemkab Madiun telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk

memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga penerapan sanksi bagi pelaku usaha. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Perubahan Perda terkait bangunan dan retribusi yang belum selesai disusun mengakibatkan berhentinya proses perizinan dan berdampak pada penerimaan retribusi daerah. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- c. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif

Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Madiun terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

- d. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.

Pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan layanan perizinan, sosialisasi, pendampingan maupun promosi investasi

Strategi Pemecahan Masalah

- a. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- c. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi
Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.
- d. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- e. Pengembangan inovasi pelayanan yang dapat diterapkan di masa pandemi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPMPTSP tahun lalu dan capaian Renstra DPMPTSP yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan
Pencapaian DPMPTSP Kabupaten Madiun s/d Tahun 2021

1	2	3	4	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			8	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				5	6	7=(6/5)		9	10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja akhir periode Renstra SKPD	Realisasi kinerja hasil program dan keluaran 2021	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target program / kegiatan Tahun 2022 (berjalan)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
PENANAMAN MODAL									
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	10 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	14 hari kerja	100%	12 hari kerja	14 hari kerja	86%

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	80%	81%	75%	77%	102,67%	75%	80%	107%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	95%	88%	90%	93%	103,33%	90%	95%	106%
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	6,4 T	1,29 T	1,4 T	1,987 T	141,93 %	1,5 T	2 T	133%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	75%	N/A	50%	60%	120%	60%	42%	70%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	13 event	1 event	1 event	1 event	100%	1 event	1 event	100%

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	80%	25,47%	70%	56,08%	80,11%	75%	70%	93%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	174 kali	N/A	50%	44,62%	89,24%	60%	20%	33%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya	300 unit	100 unit	100 unit	137 unit	137%	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	350 unit	100 unit	280 unit	320 unit	114,29%	300 unit	236 unit	79%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	300 unit	25 unit	100 unit	120 unit	120%	100 unit	30 unit	30%
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	-	10%	8,56%	85,60%	10%	10%	100%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	8.000	-	7200	6805	94,51%	7.500	8.500	113%

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	10 publikasi	10 publikasi	10 publikasi	10 publikasi	100%	10 publikasi	11 publikasi	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 (A)	80,98	80,01 (A)	79,53 (BB)	99,40%	83 (A)	80,36	97%
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	90 (A)	80	77 (B)	79,09 (B)	102,71 %	88 (A)	85	97%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dok	100%	26 dok	26 dok	100%	26 dok	15 dok	58%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi	100%	90%	100%	90%	90%	100%	100%	100%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	11 unit	250%	2 unit	5 unit	250%	4 unit	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	100%	90%	100%	90%	90%	100%	100%	100%

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	75 dok	100%	15 dok	15 dok	100%	15 dok	10 dok	67%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam bentuk:

- a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan Layanan Perizinan.
- b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
- c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

DPMPTSP Kabupaten Madiun dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian target kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2018-2021) diukur dengan menggunakan berbagai indikator antara lain : Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun untuk urusan penanaman modal pada lima tahun ke belakang menunjukkan tren positif dan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada indikator minat investasi. Adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 nyatanya tidak menurunkan minat investor untuk membuka usaha di Kabupaten Madiun. Tingginya peningkatan minat investasi di Kabupaten Madiun mencerminkan iklim investasi yang semakin kondusif dan menjanjikan. Hal ini didukung oleh beberapa faktor di antaranya:

- (1) Kemudahan perizinan terutama dengan adanya OSS, pelaku usaha lebih mudah untuk memulai usaha khususnya UMKM
- (2) Jaminan investasi, mulai dari regulasi baik pusat maupun daerah, penyediaan lahan hingga pendampingan pemenuhan perizinan
- (3) Dukungan dan kerjasama antara Pemkab Madiun dengan Pemprov maupun Pemerintah Pusat khususnya terkait penyediaan informasi prospek investasi Kabupaten Madiun bagi calon investor.
- (4) Kabupaten Madiun memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung pengembangan investasi daerah baik dari segi infrastruktur, geografis, tenaga kerja serta potensi di beberapa sektor seperti pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan/UMKM.

Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan penanaman modal, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Madiun
Tahun 2018-2021

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian (%)			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat /IKM	-	-	-	75	80	81	84	71,08	79,45	82,32	84,76	104,49	99,31	101,63	100,9
2.	Minat investasi (Rupiah)	-	-	-	79 M	300 M	310 M	1,4 T	377 M	644,87 M	1,29 T	1,98 T	527,85	214,96	416,26	141,93
3.	Realisasi Investasi (Rupiah)	-	-	-	-	450 M	500 M	900 M	-	632,74 M	889,81M	1,1T	-	140,61	177,96	123,97
4.	Jumlah investor (PMDN/PMA) (Unit)	-	-	-	420	-	-	-	428	-	-	-	99,28	-	-	-
5..	Jumlah izin yang diterbitkan	-	-	-	6.103	-	-	-	3.698	2.471	-	-	35,06	-	-	-

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Pelayanan DPMPTSP

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dimana disebutkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- e. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun difokuskan pada pelayanan kemudahan berusaha yang dapat meningkatkan realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat DPMPSTSP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun dihadapkan pada permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan dan biaya). Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain dengan :
 - a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
 - b. Tersedianya Media Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang *applicable* dan *acesible* sesuai dengan perkembangan teknologi
 - c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten dan profesional;
 - d. Tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan dan nonperizinan yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan nonperizinan. Dari data yang ada, tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus perizinan masih cukup rendah sehingga permasalahan ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan dan nonperizinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui brosur, pamflet ataupun media lainnya.
3. Belum efektifnya peran Tim Teknis dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reposisi peran tim teknis dalam pelayanan perizinan dan

nonperizinan pada DPMPTSP Kabupaten Madiun serta meningkatkan efektifitas koordinasi antar tim teknis.

4. Belum tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal daerah yang lebih terarah sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Madiun sebagai pedoman dalam usaha meningkatkan minat dan realisasi investasi.
5. Potensi investasi Kabupaten Madiun belum optimal dipromosikan kepada calon investor sehingga jumlah investor besar yang menanamkan modalnya di Kabupaten Madiun masih relatif sedikit. Selain itu, iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena dasar hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Madiun juga belum disusun.
6. Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum mencakup keseluruhan investor di Kab. Madiun. Hal ini berdampak pada kurang maksimalnya penilaian perkembangan investasi riil di lapangan. LKPM berperan penting untuk menilai realisasi investasi Kab. Madiun yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan investasi daerah yang lebih baik.

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018–2023, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Madiun yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak”*** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Madiun, yaitu:

- MISI I Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun.
- MISI 2 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.

- MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.
- MISI 4 Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.
- MISI 5 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai penyelenggara urusan penanaman modal memberikan kemudahan layanan publik dalam rangka mendukung misi ke-2 Kabupaten Madiun yaitu *Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik*.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Madiun tak lepas dari tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 2) Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan mudah, cepat, murah dan tidak berbelit-belit
- 3) Adanya konflik kepentingan sektoral
- 4) Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- 5) Pandemi Covid-19 yang berdampak pada pelemahan perekonomian daerah
- 6) Fasilitas sarana prasarana yang masih perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

- 7) Belum optimalnya fungsi Tim Teknis dan Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- 8) Rawan akan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pedoman yang jelas bagaimana menyelenggarakan Pelayanan publik yang baik, professional dan akuntabel
- 2) Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dengan ada perubahan regulasi yang didukung oleh kemudahan berusaha akan meningkatkan aktivitas investasi di daerah
- 3) Meningkatnya minat pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun
- 4) Sinergitas yang baik antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal penyusunan kebijakan penanaman modal daerah dan promosi potensi investasi Kabupaten Madiun
- 5) Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun dikategorikan dalam kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri
- 6) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam penyelenggaraan perizinan merupakan hal yang dapat dimanfaatkan untuk akselerasi peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun
- 7) Dukungan dan komitmen dari Perangkat Daerah Teknis terkait pemrosesan perizinan dan non perizinan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2022

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan

perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Percepatan pembangunan iklim investasi yang kondusif
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan serta didukung kegiatan monitoring yang intensif untuk perbaikan berkelanjutan
3. Membangun layanan yang ramah dan profesional dengan pengembangan Sistem Informasi di semua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan TI yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Rancangan awal P-RKPD DPMPTSP Kabupaten Madiun dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib penanaman modal yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun terdiri dari 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan, 7 (tujuh) sub kegiatan serta 1 (satu) program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 1
Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2022
DPMPPTSP Kabupaten Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PENANAMAN MODAL				4.128.297.549					4.520.447.549	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 (A)	3.446.165.269	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 (A)	3.838.315.269	
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	88 (A)				Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	88 (A)		
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	18.703.394	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	18.703.394	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	15 dokumen	18.703.394	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Madiun	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	15 dokumen	18.703.394	

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	2.587.103.933	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	2.665.363.933	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dok	2.587.103.933	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Madiun	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dok	2.665.363.933	
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	209.877.229	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	239.877.229	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	77.412.179	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Madiun	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	77.412.179	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Madiun	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	7.562.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Madiun	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	7.562.800	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Madiun	Persentase kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu yang terpenuhi	100%	27.046.250	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Madiun	Persentase kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu yang terpenuhi	100%	27.046.250	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	100%	97.856.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Madiun	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	100%	127.856.000	

1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	33.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	314.490.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	1 paket	33.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Madiun	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	5 paket	314.490.000	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	440.093.348	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	440.093.348	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Presentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	100%	168.093.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Madiun	Presentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	100%	168.093.800	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Presentase kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	271.999.548	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Madiun	Presentase kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	271.999.548	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	157.387.365	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	159.787.365	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Madiun	Presentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	100%	128.340.820	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Madiun	Presentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	100%	128.340.820	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	100%	29.046.545	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Madiun	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	100%	31.446.545	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	100%	70.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	100%	70.000.000	
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	80%	70.000.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	80%	70.000.000	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Bahan Rumusan/Rekomendasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	70.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah Bahan Rumusan/Rekomendasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	70.000.000	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Nilai minat investasi	1,5 Triliyun	80.950.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Nilai minat investasi	1,5 Triliyun	80.950.000	

3.1	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	60%	80.950.000	Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota		Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	60%	80.950.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	1 event	80.950.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Luar Kab. Madiun	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	1 event	80.950.000	
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	12 hari kerja	94.998.390	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	12 hari kerja	94.998.390	
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	75%	94.998.390	Pelayanan Perizinan dan Non Perzinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	75%	94.998.390	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	90%	59.988.280	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Madiun	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	90%	59.988.280	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kab. Madiun	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	35.010.110	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kab. Madiun	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	35.010.110	

5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	75%	393.394.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	75%	393.394.000	
5.1	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	60%	393.394.000	Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota		Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	60%	393.394.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	300 unit	345.218.250	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	300 unit	345.218.250	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	100 unit	48.175.750	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Madiun	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	100 unit	48.175.750	

6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	42.789.890	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	42.789.890	
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	7500	42.789.890	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Madiun	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	7500	42.789.890	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Madiun	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	10 publikasi	42.789.890	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Madiun	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	10 publikasi	42.789.890	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan dalam penyusunan perencanaan, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada DPMPTSP serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari berbagai sumber lainnya dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2022 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun akan diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, berupa:

- 1) Intensifikasi pelayanan perizinan dan non perizinan di desa/kelurahan
- 2) Sosialisasi terkait layanan Mal Pelayanan Publik lebih ditingkatkan
- 3) Penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kemudahan pelayanan publik
- 3) Pengawasan terhadap kegiatan usaha di Kabupaten Madiun lebih ditingkatkan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025. Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN tahun 2020-2024 menetapkan 2 (dua) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, dimana BKPM akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan “Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian” yang akan dicapai melalui arah kebijakan “Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi” dan strategi “Memperbaiki Iklim Usaha dan Meningkatkan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan”.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan dilaksanakan melalui:

- 1) Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 2) Fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 3) Reformasi ketenagakerjaan melalui upaya penciptaan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang didukung oleh hubungan industrial yang harmonis, penguatan collective bargaining, penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan peran pemerintah daerah, serta peningkatan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan tenaga kerja akan diwujudkan melalui penerapan sistem perlindungan social universal bagi pekerja, pembenahan sistem pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran, dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara efektif;
- 4) Penguatan kebijakan dan kelembagaan persaingan usaha; dan
- 5) Peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan holding BUMN dan membuka pasar pada jaringan internasional.

Berdasarkan peluang dan permasalahan yang ada, baik dari aspek yang ada di dalam negeri secara nasional maupun regional serta global, dapat diperoleh isu strategis terkait penanaman modal. Isu strategis tersebut direspon dan disikapi dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis Penanaman Modal BKPM Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis tersebut adalah:

- 1) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal,
- 2) Penanaman modal yang belum berkualitas, dan

- 3) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan investor *needs*.

BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Dalam Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Madiun

No.	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Madiun
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/investor	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja DPMPPTSP Kabupaten Madiun

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Madiun, tujuan dan sasaran Renja DPMPPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan penanaman modal masuk pada misi ke-2 yaitu *Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik*. Sedangkan, tujuan dan sasaran DPMPPTSP Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran DPMPPTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target Tahun 2022
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	86
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	$\frac{\sum \text{pemohon yang puas}}{\sum \text{seluruh pemohon yang terlayani}} \times 100\%$	80%
		Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rupiah)	Nilai realisasi investasi pada tahun berjalan (PMA/PMDN)	1 Triliyun

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mengimplemetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, DPMPPTSP Kabupaten Madiun menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2022 sebagai upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan DPMPPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2023 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020, dimana secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
DPMPTSP Kabupaten Madiun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.520.447.549				4.724.332.919
2.18	PENANAMAN MODAL				4.520.447.549				4.724.332.919
2.18.	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 (A)	3.838.315.269			86 (A)	3.616.870.919
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	88 (A)				90 (A)	
2.18.	01 2.01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	18.703.394			100%	50.000.000

2.18.	01	2.01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Kab. Madiun	15 dokumen	18.703.394	PAD		15 dokumen	50.000.000
2.18.	01	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan		100%	2.665.363.933			100%	2.561.870.919
2.18.	01	2.02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kab. Madiun	26 dok	2.665.363.933	DAU		26 dok	2.561.870.919
2.18.	01	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum		100%	239.877.229			100%	205.000.000
2.18.	01	2.06.	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	Kab. Madiun	100%	77.412.179	PAD		100%	70.000.000
2.18.	01	2.06.	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	Kab. Madiun	100%	7.562.800	PAD		100%	10.000.000
2.18.	01	2.06.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu yang terpenuhi	Kab. Madiun	100%	27.046.250	PAD		100%	25.000.000

2.18.	01	2.06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	Kab. Madiun	100%	127.856.000	PAD		100%	100.000.000
2.18.	01	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan		100%	314.490.000			100%	100.000.000
2.18.	01	2.07.	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Kab. Madiun	5 paket	314.490.000	PAD		4 unit	100.000.000
2.18.	01	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi		100%	440.093.348			100%	500.000.000
2.18.	01	2.08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	Kab. Madiun	100%	168.093.800	PAD		100%	200.000.000
2.18.	01	2.08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebutuhan jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Kab. Madiun	100%	271.999.548	PAD		100%	300.000.000
2.18.	01	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100%	159.787.365			100%	200.000.000

2.18.	01	2.09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	Kab. Madiun	100%	128.340.820	PAD		100%	150.000.000
2.18.	01	2.09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	Kab. Madiun	100%	31.446.545	PAD		100%	50.000.000
2.18.	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal		100%	70.000.000			100%	225.000.000
2.18.	02	2,01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan		80%	70.000.000			90%	125.000.000
2.18.	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Bahan Rumusan/ Rekomendasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab. Madiun	1 dokumen	70.000.000	PAD		1 dokumen	50.000.000
2.18.	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan evaluasi pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Kab. Madiun	-	-			4 kali	75.000.000

2.18.	02	2.02.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sektor prioritas yang dikembangkan dalam dokumen peta potensi dan peluang usaha Kab/Kota		-	-			4 sektor	100.000.000
2.18.	02	2.02.	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi yang disusun	Kab. Madiun	-	-			1 dokumen	100.000.000
2.18.	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi		1,5 Triliyun	80.950.000			1,6 Triliyun	300.000.000
2.18.	03	2.01.		Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun		60%	80.950.000			75%	300.000.000
2.18.	03	2.01.	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	Kab. Madiun	1 event	80.950.000	DBH		1 event	300.000.000
2.18.	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan		12 hari kerja	94.998.390			10 hari kerja	135.000.000

2.18.	04	2.01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan		75%	94.998.390			80%	135.000.000
2.18.	04	2.01.	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelyanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	Kab. Madiun	90%	59.988.280	DBH		95%	75.000.000
2.18.	04	2.01.	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	Kab. Madiun	100%	35.010.110	DBH		100%	60.000.000
2.18.	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal		75%	393.394.000			80%	372.462.000
2.18.	05	2.01.		Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya		60%	393.394.000			70%	372.462.000
2.18.	05	2.01.	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya	Kab. Madiun	100 unit	-	DAK Non Fisik		100 unit	75.000.000

2.18.	05	2.01.	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	Kab. Madiun	300 unit	345.218.250	DAK Non Fisik	350 unit	259.500.000
2.18.	05	2.01.	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	Kab. Madiun	100 unit	48.175.750	DAK Non Fisik	100 unit	37.962.000
2.18.	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan		10%	42.789.890		10%	75.000.000
2.18.	06	2.01.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Kab. Madiun	7.500	42.789.890		8.000	75.000.000
2.18.	06	2.01.	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	Kab. Madiun	10 publikasi	42.789.890	DBH	10 publikasi	75.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2022. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2022. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam rangka merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra DPMPTSP berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2022 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Rencana Kerja 2022 (Tahun n)	
		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
2	3	4		5		6		7		8	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BEREKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
PENANAMAN MODAL			3.059.112.883		354.442.050		645.271.172		177.131.445		4.520.447.549
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.870.531.933		148.500.000		432.912.172		101.881.165		3.838.315.269
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	4.000.000		1.500.000	100%	11.203.394	100%	2.000.000	100%	18.703.394
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	8 dok	4.000.000		1.500.000	5 dok	11.203.394	2 dok	2.000.000	15 dok	18.703.394
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	2.560.103.933	100%	-	100%	105.260.000	100%	-	100%	2.665.363.933

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yg terbayarkan	30 ASN	2.560.103.933	30 ASN	-	30 ASN	105.260.000	30 ASN	-	30 ASN	2.665.363.933
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	25%	102.678.000	25%	8.250.000	25%	120.699.229	25%	8.250.000	100%	239.877.229
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	50%	30.000.000		5.000.000	50%	37.412.179		5.000.000	100%	77.412.179
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	50%	3.750.000		-	50%	3.812.800		-	100%	7.562.800
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi	25%	5.000.000	25%	3.250.000	25%	15.546.250	25%	3.250.000	100%	27.046.250
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	25%	63.928.000	25%	-	25%	63.928.000	25%	-	100%	127.856.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung yang diadakan	50%	30.000.000		-		50%		-	100%	314.490.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan sarana dan prasana gedung kantor yang diadakan	1 paket	30.000.000			-	4 paket	284.490.000	-	-	5 paket	314.490.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	25%	112.500.000	25%	112.500.000	25%	134.499.548	25%	80.593.800	100%	440.093.348	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	25%	50.000.000	25%	50.000.000	25%	50.000.000	25%	18.093.800	100%	168.093.800	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase kebutuhan jasa pelayanan umum yang terpenuhi	25%	62.500.000	25%	62.500.000	25%	84.499.548	25%	62.500.000	100%	271.999.548	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	25%	61.250.000	25%	26.250.000	25%	61.250.000	25%	11.037.365	100%	159.787.365	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik	25%	50.000.000	25%	15.000.000	25%	50.000.000	25%	13.340.820	100%	128.340.820	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	25%	11.250.000	25%	11.250.000	25%	11.250.000	25%	(2.303.455)	100%	31.446.545	

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	375 M	7.580.950	375 M	64.942.050	375 M	8.427.000	375 M	-	1,5 T	80.950.000
Penyelenggaraan Promosi PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	10%	7.580.950	30,00%	64.942.050	50%	8.427.000	60%	-	60%	80.950.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	-	7.580.950	1 event	64.942.050	-	8.427.000	-	-	1 event	80.950.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	-	100%	50.000.000	100%	70.000.000
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	25%	10.000.000	50%	10.000.000	70%	-	80%	50.000.000	80%	70.000.000
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Bahan Rumusan/ Rekomendasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-	1 dok	50.000.000	1 dokumen	70.000.000

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	12 hari	36.000.000	12 hari	25.000.000	12 hari	18.000.000	12 hari	15.998.390	12 hari	94.998.390
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	75%	36.000.000	75%	25.000.000	75%	18.000.000	75%	15.998.390	75%	94.998.390
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	90%	30.000.000	90%	10.000.000	90%	10.000.000	90%	9.988.280	90%	59.988.280
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	6.000.000	100%	15.000.000	100%	8.000.000	100%	6.010.110	100%	35.010.110
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	15%	135.000.000	30%	90.000.000	50%	160.932.000	75%	7.462.000	75%	393.394.000
Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	10%	135.000.000	25%	90.000.000	45%	160.932.000	60%	7.462.000	60%	393.394.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	75 unit	130.000.000	75 unit	75.000.000	75 unit	135.718.250	75 unit	4.500.000	300 unit	345.218.250
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	25 unit	5.000.000	25 unit	15.000.000	25 unit	25.213.750	25 unit	2.962.000	100 unit	48.175.750
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	-	10%	16.000.000	10%	25.000.000	10%	1.789.890	10%	42.789.890
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	1.875	-	1.875	16.000.000	1.875	25.000.000	1.875	1.789.890	7.500	42.789.890
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	-	-	3 publikasi	16.000.000	4 publikasi	25.000.000	3 publikasi	1.789.890	10 publikasi	42.789.890

BAB V PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Perubahan Renja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2022.

Penyusunan Renja DPMPTSP sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan DPMPTSP sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Perubahan Tahun 2022 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan realisasi investasi dan di Kabupaten Madiun.

Madiun, 31 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN


ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003